

UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT DI NAGARI SITUAK UJUNG GADING KECAMATAN LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

SISKA MARLINA¹, ROFAH²

Administrasi Negara, Universitas Pamulang

Email: dosen03227@unpam.ac.id¹, rofahsaputri0@gmail.com²

Abstract: *This study addresses the issue of low political participation among first-time voters in the 2024 regional elections in West Pasaman Regency. The objective of the study was to analyze the efforts of the West Pasaman Regency General Elections Commission (KPU) to increase first-time voter participation and identify the obstacles faced, particularly in Situak Ujung Gading Village, Lembah Melintang District. The method used was qualitative with a descriptive approach through interviews and observations. The results showed that the KPU (General Elections Commission) had implemented various voter education and outreach initiatives. However, participation was still hampered by low political knowledge among first-time voters, ineffective outreach, and minimal awareness of obtaining a National Identity Card (KTP) as an administrative requirement for voters in the ongoing local democratic process.*

Keywords: *General Election Commission (KPU), Political Participation and New Voters*

Abstrak: Penelitian ini mengangkat isu rendahnya partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman Barat. Tujuan penelitian adalah menganalisis upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, khususnya di Desa Situak Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan KPU telah melaksanakan berbagai inisiatif sosialisasi dan pendidikan pemilih. Namun, partisipasi masih terhambat oleh rendahnya pengetahuan politik pemilih pemula, kurang efektifnya penyuluhan, serta minimnya kepedulian terhadap pengurusan Kartu Tanda Penduduk sebagai syarat administratif pemilih dalam proses demokrasi lokal berkelanjutan.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partisipasi Politik dan Pemilih Baru

A. Pendahuluan

Sesuai dengan Konstitusi 1945, pemilihan umum, atau PEMILU, merupakan cara untuk mencapai kedaulatan rakyat dengan menunjukkan keterlibatan seluruh rakyat Indonesia dalam pengelolaan pemerintahan negara. Salah satu cara bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam politik nasional adalah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip berikut, menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Independen, Jujur, Adil, Kepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesionalisme, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi.

Pasal 6, KPU terdiri dari KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. Dan pasal 7 : “wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari pengaruh dari pihak mana pun dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya”. Pemilu dilakukan dalam bentuk pemilihan presiden/eksekutif, wakil rakyat/legislatif. Para pemimpin daerah, seperti gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan walikota dan wakil walikota untuk kota, dipilih melalui pemilihan lokal yang dikenal sebagai Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Kondisi Non-Alami Akibat Penyakit Virus Corona (COVID-19), “Pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan

pengecehan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh yang berpihak dalam penyelenggara pemilihan”. “pilkada diselenggarakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dengan diawasi oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) provinsi dan bawaslu kabupaten/kota. Khusus di Aceh, pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH)”

Membangun negara demokrasi adalah salah satu tujuan utama rakyat Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam prinsip keempat konstitusi. Karena demokrasi adalah kedaulatan rakyat, maka rakyat harus menjadi pusat dari semua tindakan politik yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Sejauh mana rakyat dan keterlibatan mereka dalam pembuatan kebijakan publik sangat penting dan berfungsi sebagai sumber informasi utama bagi semua lembaga yang dipercayakan untuk memajukan kepentingan umum merupakan ukuran kemajuan proses demokrasi di suatu negara. Pemilihan umum dan daerah di Indonesia memberikan contoh nyata dari proses demokrasi negara (Pilkada). “Pada tahun 2024 diselenggarakan pilkada serentak diseluruh Indonesia dan diikuti oleh 270 daerah dimana ada 9 provinsi 37 kota dan 224 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada di 2024”. Pasaman Barat termasuk menjadi salah satu daerah yang mengadakan pilkada secara serentak pada masa *covid*, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial, hadirnya sosial yang berbasis internet (*media online*) memudahkan KPU untuk memberikan informasi, dimana sekarang kebanyakan masyarakat menggunakan *media online* dan banyak diminati masyarakat khususnya pemilih pemula seperti *facebook*, *whatsapp*, *youtube* dan lainnya.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Misdarliah Selaku Divisi Partisipasi Masyarakat (KPU Pasaman Barat) adalah sebagai berikut: Partisipasi masyarakat memang meningkat dibandingkan tahun 2020 lalu, meskipun antusias masyarakat sudah kita kasih apresiasi atas partisipasinya sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah, tetapi memang masyarakat dan petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) kitaberikan alat pelindung diri (APD), agar pemilih ini merasa nyaman dan aman, dan diharapkan tidak serta menaati protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah.

Keterlibatan masyarakat umum dalam pemilihan sangat penting. Mayoritas orang sangat penting bagi keberhasilan atau kegagalan pemilihan karena nasib wilayah mereka akan ditentukan oleh tingkat keterlibatan mereka. Tingkat partisipasi politik publik yang tinggi diperlukan karena pemilihan langsung pemimpin nasional atau regional merupakan momen penting bagi suatu bangsa. Keterlibatan yang dimaksud melampaui sekadar menggunakan hak pilih; melainkan berfokus pada bagaimana hak tersebut dapat dipraktikkan dengan membuat keputusan yang bijaksana yang akan bermanfaat bagi bangsa secara keseluruhan. Salah satu segmen pemilih dalam pilkada adalah adanya pemilih pemula. Pemilih pemula adalah “terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, yang baru pertama kali melakukan penggunaan hak pilihnya. Mereka biasanya adalah pelajar berusia 17-21 tahun, namun ada juga kalangan muda lainnya yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pilkada yakni para mahasiswa dan kelompok pemuda lainnya yang pada pilkada periode sebelumnya belum genap berusia 17 tahun”.

Pemilih pemula memang menjadi segmen yang unik, karena sering kali memunculkan kejutan dalam proses setiap pilkada. Karena pemilih pemula biasanya menunjukkan perilaku yang sangat antusias, pilihan mereka sering kali dapat berubah atau belum pasti. Keputusan politik mereka lebih dipengaruhi oleh dinamika iklim politik lokal daripada pertimbangan ideologis tertentu. Kepentingan tertentu dapat dengan mudah mempengaruhi pemilih pemula, terutama orang-orang terdekat mereka, seperti orang tua, kerabat, dan teman bermain. Perilaku pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah sebelumnya memperjelas hal ini.

Sosialisasi pemilu sangat penting bagi pemilih pemula karena perlu memberikan pengetahuan politik tentang pentingnya pemilihan daerah di wilayah tersebut, serta tentang berbagai aspek pemilihan, seperti sistem, tahapan, dan lembaga penyelenggara. Salah satu tahapan pemilihan daerah adalah sosialisasi pemilu karena pemilih baru harus memperoleh keterampilan kewarganegaraan. Sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih tidak hanya mengajarkan pemilih baru cara memberikan suara, tetapi juga mendorong pertumbuhan

keterampilan kewarganegaraan, yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemikiran kritis selama proses pemilihan. Dengan pendekatan ini, pemilih pemula mungkin tidak lagi hanya menjadi objek dalam proses pemilu, tetapi juga menjadi subjek penting dalam pengambilan keputusan politik mereka.

Pilkada pada tahun 2020 KPU Pasaman Barat menetapkan lima (5) kandidat dan “menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 262.654”. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 184.554 jiwa, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 70,27 persen, di Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang ditetapkan DPT sebanyak 28.371, pemilih yang menggunakan hak pilih 20.993 jiwa, pemilih pemula sendiri berjumlah sebanyak 4.158 jiwa, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 70 persen.

Nagari Situak Ujung Gading pada saat ini terus tumbuh dan berkembang baik dari segi jumlah penduduknya maupun kegiatan perekonomian masyarakatnya. Jumlah penduduk nagari tersebut 43.000 jiwa. Secara pemerintahan nagari tersebut terbagi menjadi 16 kejurongan, pemerintah nagari dipimpin langsung dipimpin oleh Wali Nagari yang dipilih langsung oleh rakyat dan Badan Musyawarah Nagari yang anggotanya sebanyak 11 orang yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama dan pemuka masyarakat. Nagari Ujung Gading ini samaluasnya dengan wilayah Kecamatan, sehingga terjadi kemungkinan tumpang tindih antara tingkat Kecamatan dengan tingkat Nagari. Menurut peraturan yang berlaku, sebenarnya satu Kecamatan minimal mengkoordinir 2 Desa (Nagari). Rendahnya keterlibatan politik pemilih pemula sebagian disebabkan oleh kurangnya penyuluhan, yang hanya dilakukan menjelang pemilihan daerah. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum melakukan upaya yang memadai untuk mendidik dan mengajari pemilih pemula tentang cara memilih. Pemilih pemula dan masyarakat umum harus memahami pentingnya pemilihan daerah dan nilai suara mereka untuk kemajuan daerah mereka.

KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam menghadapi pemilihan serentak harus melakukan upaya untuk peningkatan partisipasi masyarakat atau pemilih pemula. Dengan mengadakan sosialisasi keliling untuk menginformasikan kepada masyarakat atau pemilih pemula bagaimana pentingnya pilkada tersebut. Berdasarkan yang diamati penulis, pemilih pemula masih kurang peduli dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), khususnya usia yang sudah tamat SMA yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, banyak diantara mereka yang tidak peduli dalam hal pembuatan KTP, sementara syarat utama dalam memilih harus mempunyai KTP.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Didik Rujuanto selaku bagian data pemilih (anggota KPU Pasaman Barat) adalah sebagai berikut: Kami sudah berupaya semaksimal mungkin khusus menarik minat pemilih pemula ini dengan membuat lomba mengedit video ajakan ke TPS, bagaimana memilih yang baik dan taat sesuai dengan protokol kesehatan, dan bekerjasama dengan Catatan Sipil, dan capil ini sendiri sudah turun ke daerah langsung.

Penulis ingin mencari informasi lebih mendalam berdasarkan uraian sebelumnya dengan menggunakan judul “Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat di Nagari Situak Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024”

B. Metode Penelitian

Metodologi adalah studi tentang strategi atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur ilmiah yang harus diikuti untuk mengumpulkan data yang andal disebut sebagai metodologi (Sugiyono, 2017). Kerangka kerja atau teknik metodis yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dikenal sebagai metodologi penelitian. Singkatnya, metodologi adalah prosedur atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian dan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Sementara itu, Creswell (2014) mendefinisikan metodologi sebagai seperangkat aturan, pedoman, dan praktik yang digunakan peneliti ketika merencanakan studi, mengumpulkan informasi, dan mengevaluasi temuan. Ini mencakup metode yang digunakan oleh peneliti untuk menghubungkan teori dan praktik dalam pekerjaan mereka.

Cara lain untuk mendeskripsikan metodologi adalah sebagai proses pengumpulan dan analisis fakta untuk memahami realitas sosial. Dengan menggunakan berbagai metode ilmiah, ini adalah pendekatan metodis untuk mengidentifikasi dan menafsirkan kejadian (Neuman, 2014). Metodologi adalah proses mengidentifikasi dan mengevaluasi fakta menggunakan metode yang terorganisir dan metodis. Karena memungkinkan mereka untuk menemukan, memperoleh, memproses, mengevaluasi, dan menyajikan materi penelitian yang bermanfaat bagi publik, para peneliti terus-menerus dihadapkan pada masalah ini dalam setiap penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif, yaitu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat dan mengungkapkan suatu situasi atau objek dalam konteksnya; menemukan makna atau pemahaman mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang muncul dalam bentuk data kualitatif, baik berupa kata-kata, gambar, atau peristiwa dan dalam (lingkungan alam), Hadi Anwar dalam Asrul Hag Alang, Andi Ibrahim, dkk. (2018: 20).

C. Pembahasan dan Analisa Pembahasan

Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pilkada Tahun 2024, Tujuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat adalah menyelenggarakan pemilihan dengan jujur, kompeten, otonom, terbuka, dan bertanggung jawab. KPU menggunakan sejumlah taktik untuk meningkatkan keterlibatan politik pemilih pemula menjelang pemilihan daerah 2024, khususnya di Nagari Situak Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang:

1. **Sosialisasi langsung (tatap muka)** ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman dasar tentang pentingnya menggunakan hak pilih.
2. **Penyebaran informasi melalui media massa**, seperti siaran radio lokal dan media sosial (Instagram, Facebook), untuk menjangkau generasi muda secara lebih luas.
3. **Penyelenggaraan lomba konten digital**, seperti video kampanye ajakan memilih, khusus untuk pemilih pemula sebagai bentuk edukasi yang interaktif.
4. **Kampanye keliling menggunakan mobil pengeras suara**, khususnya ke daerah-daerah yang tidak terjangkau internet, untuk menyampaikan informasi tentang tahapan dan pentingnya pemilu.
5. **Kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)** untuk membantu pemilih pemula dalam pengurusan E-KTP, yang menjadi syarat utama untuk bisa memilih, terutama di daerah terpencil seperti Jorong Situak dan Situk Barat.
6. **Pemberdayaan relawan demokrasi**, untuk menyebarluaskan informasi dan menjangkau kelompok pemuda yang belum tersentuh sosialisasi formal.

Dari sisi kelembagaan KPU Pasaman Barat KPU Pasaman Barat memiliki struktur kelembagaan yang terdiri atas: 5 orang komisioner dengan pembagian tugas divisi yang jelas, 30 pegawai, yang terdiri dari 15 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 15 tenaga honorer, Struktur organisasi disusun sesuai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, yang meliputi unsur pimpinan, pembantu pimpinan, dan pelaksana teknis.

Hambatan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula, Meskipun upaya sosialisasi dan edukasi telah dilakukan, KPU Pasaman Barat masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain:

1. **Banyak pemilih pemula belum memiliki E-KTP**, sehingga tidak bisa terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. **Partisipasi yang rendah** dalam kegiatan seperti lomba konten video, menunjukkan kurangnya antusiasme atau keterlibatan aktif dari pemilih pemula.
3. **Materi sosialisasi yang kurang menarik dan kurang inovatif**, baik secara online maupun offline, sehingga tidak mampu membangun ketertarikan dan kesadaran politik anak muda.
4. **Keterbatasan anggaran sosialisasi**, khususnya untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang membutuhkan pendekatan khusus.
5. **Jumlah relawan demokrasi yang belum memadai**, menyebabkan tidak semua daerah, terutama yang sulit akses internet, dapat dijangkau.

6. **Frekuensi sosialisasi yang terbatas** dan cenderung hanya dilakukan menjelang pemilihan, bukan secara berkelanjutan.

7. **Kurangnya integrasi dengan lembaga pendidikan**, padahal sekolah dan kampus merupakan basis potensial bagi pemilih pemula.

Melalui berbagai strategi yang telah diterapkan, partisipasi pemilih pemula **menunjukkan peningkatan** dibanding pemilihan sebelumnya, meskipun belum maksimal. Diperlukan pendekatan yang **lebih kreatif, inklusif, dan berkelanjutan**, termasuk perbaikan dalam desain kampanye edukatif yang lebih relevan dengan dunia pemuda. Kesadaran pemilih pemula penting ditanamkan sejak dini, karena suara mereka menentukan arah pembangunan daerah di masa depan.

Analisa

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat telah menerapkan sejumlah taktik untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, namun masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan budaya, menurut temuan penelitian. Inisiatif positif yang menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan karakteristik pemilih pemula di era digital meliputi pendekatan langsung, penggunaan media sosial, dan partisipasi relawan demokrasi. Taktik-taktik ini mendukung gagasan partisipasi demokrasi inklusif, di mana pemilih muda secara aktif dan kreatif berpartisipasi dalam proses politik. Meskipun demikian, efektivitas strategi tersebut masih di bawah standar. Kendala utama meliputi hal-hal seperti kurangnya kreativitas dalam penyampaian pesan, rendahnya keterlibatan dalam aktivitas interaktif, dan kurangnya rasa memiliki terhadap e-KTP. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan tidak sepenuhnya sesuai dengan selera dan preferensi komunikasi generasi muda saat ini.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi di semua wilayah, khususnya wilayah dengan akses informasi terbatas, semakin terhambat oleh kendala anggaran dan kelangkaan relawan demokrasi. Selain itu, ruang untuk pendidikan politik berkelanjutan juga terbatas karena kegiatan KPU tidak terintegrasi dengan lembaga akademik. Sejak usia dini, sekolah dan perguruan tinggi merupakan tempat penting untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi.

Oleh karena itu, dalam hal media, konten, dan strategi komunikasi, diperlukan pendekatan yang lebih inovatif, fleksibel, dan berkelanjutan. Meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan dan teknologi digital mungkin sangat penting untuk meningkatkan kesadaran politik para pemilih pemula.

D. Penutup

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat telah melihat peningkatan jumlah pemilih pemula dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pendekatan yang lebih inovatif, pendanaan yang lebih besar, dan peningkatan kesadaran masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

1. Upaya Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih baru di era digital telah sepenuhnya berhasil di Desa Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana dibuktikan dengan peningkatan jumlah pemilih dari pemilu daerah tahun 2015, di mana tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan mencapai 62,91%. Pada pemilu daerah tahun 2020, terdapat 268.641 pemilih dalam daftar pemilih Kabupaten Pasaman Barat (DPT, DPTB, dan DPPH), dan 184.557 pemilih, atau 68,70%, menggunakan hak pilihnya.
2. Di Nagari Situak Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Komisi Pemilihan Umum menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di era digital. Tantangan tersebut meliputi kurangnya respons dan partisipasi pemilih pemula, seperti yang dibuktikan oleh kompetisi konten video KPU yang hanya dihadiri oleh empat pemilih pemula, serta kurangnya Relawan Demokrasi dan keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sehingga mereka memberikan informasi menggunakan pengeras suara dan hanya mengundang perwakilan ketika melakukan sosialisasi langsung. Lebih jauh lagi, dapat diklaim bahwa baik KPU maupun relawan demokrasi memiliki keterbatasan waktu. Karena kegiatan sosialisasi hanya dapat

dilakukan antara tanggal 26 September dan 5 Desember, tujuannya adalah untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, khususnya para pemilih pemula.

Daftar Pustaka

- KPU Pasaman Barat. (2023). Pemilih Pemula jadi Pelopor Gerakan Anti Money Politic di Pemilu 2024. Radar Sumbar. <https://radarsumbar.com/sumbar/pasaman-barat/83633/kpu-pasbar-pemilih-pemula-jadi-pelopor-gerakan-anti-money-politic-di-pemilu-2024/>
- KPU Kabupaten Ngawi. (2018). Strategi Sosialisasi Politik oleh KPU Kabupaten Ngawi untuk Membentuk Pemilih Pemula yang Cerdas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*. <https://socius.ppj.unp.ac.id/index.php/socius/article/view/129>
- KPU Kota Palu. (2023). KPU Kota Palu Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Pemilu 2024. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/3602703/kpu-kota-palu-tingkatkan-partisipasi-pemilih-pemula-di-pemilu-2024>
- Novianti Fety dkk. (2018). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak: Ampera.
- Rachmat H. basuki dan Esther. (2015). Perilaku pemilih pemula dalam pilkada serentak di kecamatan ciomas kabupaten serang tahun 2015, Serang.
- Ratna mulyadi Ikle Atikah dkk. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor, Bogor.
- Sari Yayang Novika. (2019). Peran dan Upaya Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Demi Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Demokratis, Malang.
- Yasa Ahclak Asmara. 2018. Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa (Studi terhadap Pemilih Pemula di Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa), Makassar.
- SetiawanWawan. (2017). Era Digital dan Tantangannya, Jakarta: UPI.